

PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK



SUDARYANO R. LAMANGKONA, S.Sos.,M.Si

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



DASAR HUKUM

1

**Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

2

**Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik**

3

**Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik**

4

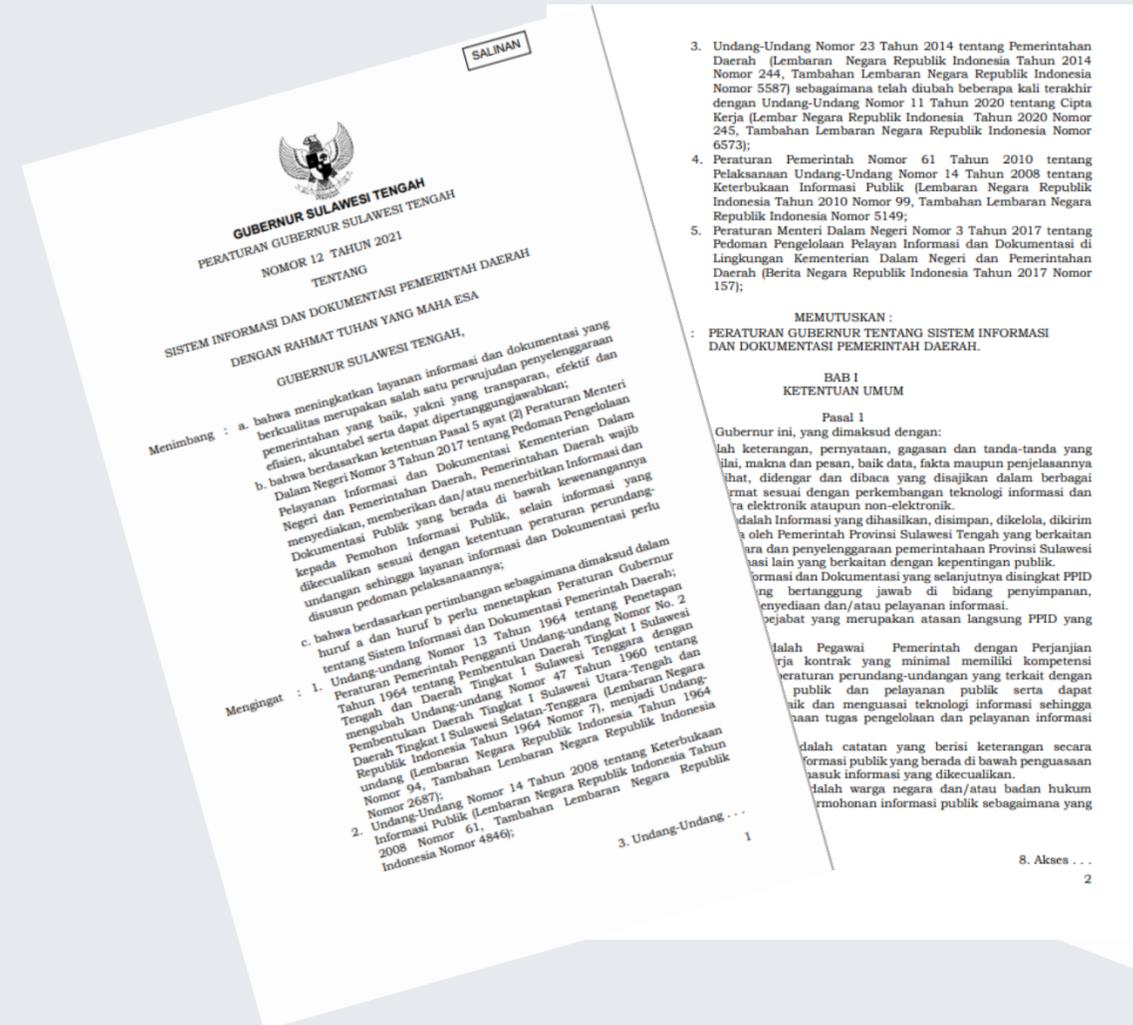
**Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik**

5

**Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Daerah**

Pergub yang membahas terkait PPID

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah



APA ITU PPID



PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan dan pelayanan publik.



JENIS-JENIS PPID

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, PPID terdiri dari :

PPID UTAMA

PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PPID PELAKSANA

PPID Pelaksana, dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah Kabupaten/Kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.



Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas, badan publik negara dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional tertentu, seperti Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, dan yang lainnya. Tugas dan fungsi dalam kegiatan PPID dapat dijadikan sumber angka kredit ASN Jabatan Fungsional Tertentu tersebut.

Wewenang PPID Utama



memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan bersama dengan unit/satuan kerja/PPID pelaksana terkait



melakukan koordinasi dengan PPID pelaksana dan/atau unit terkait dalam menyelesaikan keberatan



Meminta informasi kepada perangkat PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik yang tidak dikuasai PPID Utama namun dikuasai oleh perangkat PPID yang menjadi cakupan kerjanya



mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya



menolak permohonan informasi publik apabila informasi yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut



melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Badan Publiknya.

TUGAS PPID PELAKSANA

Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya

Menyampaikan informasi publik yang berada dibawah satuan kerjanya kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan

Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan



Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima

Menyediakan meja informasi di lingkup PPID Pembantu dan memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat

Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan informasi publik di unit/satuan kerjanya

INFORMASI YANG DAPAT DIPUBLIKASIKAN

INFORMASI PUBLIK

Informasi yang tidak dikecualikan atau dilindungi oleh undang-undang terkait transparansi, hak untuk mengetahui, dan akses informasi

DOKUMEN TERBUKA

Dokumen-dokumen yang tidak memuat informasi rahasia, pribadi, atau yang mempengaruhi keamanan negara, dan yang secara umum dapat diakses oleh publik

INFORMASI NON-RAHASIA

Informasi yang tidak dianggap sebagai rahasia atau terkait dengan keamanan nasional

DATA UMUM

Informasi atau data yang tidak memiliki risiko signifikan jika diakses oleh publik dan tidak melanggar privasi individu atau kelompok

INFORMASI YANG TIDAK DAPAT DIPUBLIKASIKAN



Informasi Rahasia Negara

Informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara karena berpotensi merugikan keamanan nasional atau kepentingan negara lainnya



Informasi Pribadi

Informasi yang terkait dengan individu tertentu yang dilindungi oleh undang-undang privasi



Rahasia Dagang

Informasi-informasi yang berharga secara komersial bagi suatu organisasi dan dianggap rahasia untuk menjaga keunggulan kompetitif



Informasi yang Bersifat Rahasia atau Rahasia Keamanan

Informasi yang memiliki risiko jika disalahgunakan, dapat merugikan individu, organisasi, atau masyarakat pada umumnya



Informasi yang Terlarang oleh Hukum

Informasi yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku, termasuk konten ilegal atau melanggar hak cipta



ALUR

PPID PELAKSANA KE PPID UTAMA

- **Permintaan Informasi dari Publik**



Pengajuan Permohonan



Penerimaan Permohonan



Penelaahan Permohonan



Pengumuman Keputusan

- **Pelaporan ke PPID Utama**



Pelaporan Permintaan Informasi



Transparansi Informasi



ALUR PPID UTAMA KE PUBLIK

- **Pengelolaan Informasi dari PPID Pelaksana**



Penerimaan Laporan dari PPID Pelaksana



Pengawasan dan Koordinasi

- **Penerbitan Informasi untuk Publik**



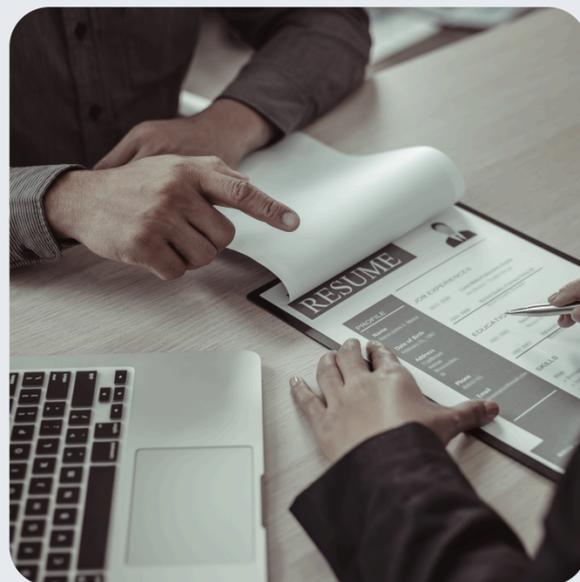
Penyusunan Informasi Publik



Pengumuman Informasi



AKSES INFORMASI PUBLIK



Melalui Permohonan Langsung



Melalui Publikasi Informasi

BADAN PUBLIK

Badan publik adalah organisasi atau lembaga yang didirikan, dikelola, atau diawasi oleh pemerintah atau otoritas publik. Badan ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan umumnya beroperasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan pelayanan publik, mengelola sumber daya, dan mendukung kepentingan masyarakat.

Badan Publik Negara adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



TUGAS DAN FUNGSI BADAN PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1

Memberikan Akses Informasi

2

Mendukung Transparansi

3

Menyediakan Informasi Akurat

4

Melayani Permintaan Informasi

5

Melibatkan Masyarakat

6

Menetapkan Kebijakan Keterbukaan Informasi

7

Melindungi Informasi yang Sensitif



KLASIFIKASI DAN JENIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Berdasarkan Sumber Informasi :
Proaktif dan Reaktif



Berdasarkan Tingkat Partisipasi
Masyarakat : Interaktif dan
Partisipatif



Berdasarkan Aspek Kebijakan dan
Administratif : Keterbukaan Keuangan
dan Keterbukaan Administratif



Berdasarkan Media dan Teknologi :
E-Partisipasi dan Keterbukaan
Informasi Digital



Berdasarkan Konten Informasi :
Keterbukaan Informasi Ilmiah dan
Penelitian dan Keterbukaan Informasi
Lingkungan



Berdasarkan Tujuan Edukasi dan
Penyuluhan : Pendidikan dan
Penyuluhan



Berdasarkan Waktu : Real-time dan
Bertahap

KRITERIA PENILAIAN KEAKTIFAN PPID PELAKSANA

Aktif :

- web masing – masing PPID pelaksana aktif
- Aktif mengikuti desk yang dilaksanakan oleh dinas KOMINFO
- Aktif menginput data di web PPID utama
- Nilai questioner diatas 90 (Nilai questioner diambil dari data yang di input di web PPID utama)

Tidak Aktif :

- web masing – masing PPID pelaksana tidak aktif
- Tidak Aktif mengikuti desk yang dilaksanakan oleh dinas KOMINFO
- Tidak Aktif menginput data di web PPID utama
- Nilai questioner dibawah 90 (Nilai questioner diambil dari data yang di input di web PPID utama)

KRITERIA PENILAIAN

KEAKTIFAN WEBSITE PPID PELAKSANA

Aktif

website dari PPID pelaksana tersebut sudah ada dan mempunyai Alamat domain .go.id

Tidak Aktif

sama sekali belum mempunyai website dan belum mempunyai Alamat domain .go.id

Maintenance

website PPID pelaksana sedang bermasalah atau tidak bisa diakses dan dinyatakan tidak aktif.



KRITERIA PENILAIAN KEAKTIFAN WEBSITE KAB/KOTA

Aktif

website dari PPID pelaksana tersebut sudah ada dan mempunyai Alamat domain .go.id

Tidak Aktif

sama sekali belum mempunyai website dan belum mempunyai Alamat domain .go.id

Maintenance

website PPID pelaksana sedang bermasalah atau tidak bisa diakses dan dinyatakan tidak aktif.



EVALUASI OPD PEMPROV

INI ADALAH DATA PPID PELAKSANA YANG AKTIF DAN TIDAK AKTIF, DIMANA PPID PELAKSANA SEBANYAK 42 OPD:

Yang Aktif Sebanyak 10 OPD Diantaranya : KESBANGPOL, BRIDA, BPSDM, CIKASDA, DISLUTKAN, DISKOMINFO, DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU, DINSOS, INSPEKTORAT, RSUD MADANI.

Yang Tidak Aktif Sebanyak 32 OPD Diantaranya : BKD, BPBD, BAPENDA, BPKAD, BADAN PENGHUBUNG PROVINSI, BAPPEDA, BINAMARGA, ESDM, DISBUD, DISHUT, DUKCAPIL, DINKES, DINKOP, DLH, DINAS PANGAN, DINAS PARIWISATA, DPMD, DP3A, DISPORA, DINAS PENDIDIKAN, DP2KB, DISHUB, DISPERINDAG, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, PERKIMTAN, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLIKULTURA, DINAKETRANS, SATPOLPP, SEKRETARIAT DAERAH/BIROPIMPINAN DAERAH, SEKRETARIAT DPR, RSUD UNDATA

NO	NAMA OPD	NILAI	OPD AKTIF/TIDAK	
			AKTIF	TIDAK
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	74		
2	BADAN KESATUAN BANGSA	95		
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	85		
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	74		
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	92		
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	72		
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	92		
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI			
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	87		
10	DINAS BINAMARGA DAN PENATAAN RUANG	70		
11	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBERDAYA AIR	94		
12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-		
13	DINAS KEBUDAYAAN	23		
14	DINAS KEHUTANAN	23		
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	92		
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	72		
17	DINAS KESEHATAN	75		
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	92		
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	89		
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	65		
21	DINAS PANGAN	62		
22	DINAS PARIWISATA	74		
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62		
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	52		
25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	77		
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	95		
27	DINAS PENDIDIKAN	-		
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	58		
29	DINAS PERHUBUNGAN	72		
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	68		
31	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	52		
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	52		
33	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-		
34	DINAS SOSIAL	92		
35	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLIKULTURA	34		
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-		
37	INSPEKTORAT DAERAH	95		
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	87		
39	SEKRETARIAT DAERAH / BIRO PIMPINAN DAERAH	3		
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	72		
41	RSUD MADANI	90		
42	RSUD UNDATA	83		

PPID pelaksana yg aktif berkontribusi menginput data di Web OPD seperti data keuangan, data yg terkait OPDnya, mempublish berita dan video dan aktif berkonsultasi ke PPID Utama. sementara yg tdk aktif adalah :

1. ada bbrp OPD yg memiliki Website tetapi dlm status maintenance dlm artian memiliki website berdomain sultengprov.go.id tp tdk dapat dibuka
2. Memiliki website yg aktif tp tdk aktif berkontribusi menginput data terkait data keuangan yg wajib dipublish dan terbuka dimasyarakat
3. Tdk aktif menginput berita, foto dan video
4. Tidak aktif berkonsultasi ke PPID utama

EVALUASI WEBSITE OPD PEMPROV

Ini Adalah Data Web Masing-masing PPID Pelaksana Yang Aktif , Tidak Aktif Dan Maintenance, Dimana PPID Pelaksana Sebanyak 42 OPD :

-Yang Tidak Aktif 4 OPD Diantaranya : Dinas Kebudayaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Sekertariat daerah / Biro Pimpinan Daerah dan Badan Penghubung Provinsi.

-Yang Aktif 25 OPD Diantaranya : BKD, KESBANGPOL, BPBD, BAPENDA, BRIDA, BPSDM, BAPPEDA, CIKASDA, DISLUTKAN, DIKOMINFO, DINKOP, DLH, DINAS PARIWISATA, DP3A, DISPORA, DP2KB, DISHUB, DISPERINDAG, DINSOS, Dinas Tanaman Pangan, Disnakertrans, Inspektorat, satpolPP, RSUD Madani, RSUD Undata.

-Yang Maintenance 13 OPD Diantaranya : BPKAD, Binamarga, ESDM, DISHUT, DUKCAPIL, DINKES, DPMD, DINAS PENANAMAN MODAL, DINAS PENDIDIKAN, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, PERKIMTAN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

NO	NAMA OPD	WEBSITE AKTIF/TIDAK		
		AKTIF	TIDAK	MAINTENANCE
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
2	BADAN KESATUAN BANGSA			
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			MAINTENANCE
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI			
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
10	DINAS BINAMARGA DAN PENATAAN RUANG			MAINTENANCE
11	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBERDAYA AIR			
12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			MAINTENANCE
13	DINAS KEBUDAYAAN			
14	DINAS KEHUTANAN			MAINTENANCE
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			MAINTENANCE
17	DINAS KESEHATAN			MAINTENANCE
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
21	DINAS PANGAN			MAINTENANCE
22	DINAS PARIWISATA			
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			MAINTENANCE
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
25	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			MAINTENANCE
27	DINAS PENDIDIKAN			MAINTENANCE
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
29	DINAS PERHUBUNGAN			
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
31	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			MAINTENANCE
33	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN			MAINTENANCE
34	DINAS SOSIAL			
35	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
37	INSPEKTORAT DAERAH			
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
39	SEKRETARIAT DAERAH / BIRO PIMPINAN DAERAH			
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT			MAINTENANCE
41	RSUD MADANI			
42	RSUD UNDATA			

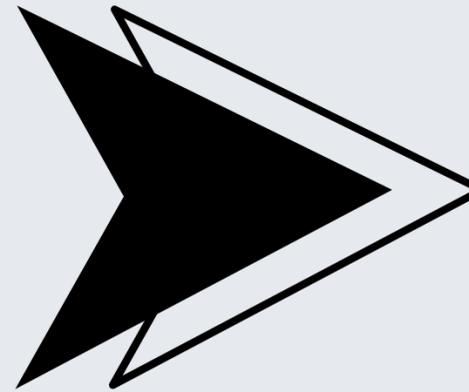
Data OPD yang website berstatus maintenance *memiliki alamat website yg berdomain Sultengprov.go.id namun tdk bisa d buka dikarenakan belum membayar/melanjutkan sewa servernya

EVALUASI KAB/KOTA

INI ADALAH DATA PPID PELAKSANA KAB/KOTA YANG AKTIF DAN TIDAK AKTIF, DIMANA PPID PELAKSANA KAB/KOTA SEBANYAK 13 KAB/KOTA:

Yang Aktif Sebanyak 0 Kab/Kota.

Yang Tidak Aktif Sebanyak 13 Kab/Kota
Diantaranya : KOTA PALU, KAB. DONGGALA, KAB. SIGI, KAB. PARIGI MOUTONG, KAB. POSO, KAB. TOJO UNAUNA, KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN, KAB. BANGGAI LAUT, KAB. MOROWALI, KAB. MOROWALI UTARA, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL



NO	NAMA KAB/KOTA	OPD AKTIF/TIDAK		
		NILAI	AKTIF	TIDAK
1	KOTA PALU			
2	KABUPATEN DONGGALA			
3	KABUPATEN SIGI			
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG			
5	KABUPATEN POSO			
6	KABUPATEN TOJO UNAUNA	10		
7	KABUPATEN BANGGAI	27		
8	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN			
9	KABUPATEN BANGGAI LAUT	35		
10	KABUPATEN MOROWALI			
11	KABUPATEN MOROWALI UTARA	21		
12	KABUPATEN TOLITOLI	29		
13	KABUPATEN BUOL	34		

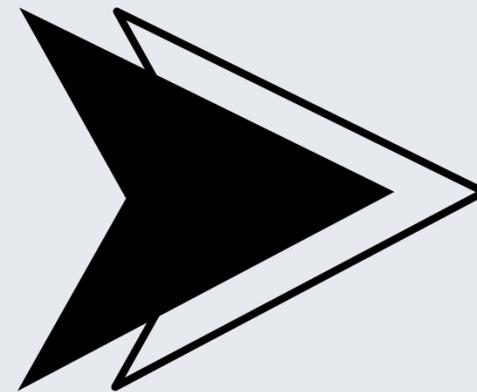
EVALUASI WEBSITE KAB/KOTA

INI ADALAH DATA WEB MASING-MASING PPID PELAKSANA KAB/KOTA YANG AKTIF , TIDAK AKTIF DAN MAINTENANCE, DIMANA PPID PELAKSANA SEBANYAK 13 KAB/KOTA :

Yang Tidak Aktif 0 Kab/Kota.

Yang Aktif 13 Kab/Kota Diantaranya : KOTA PALU, KAB. DONGGALA, KAB. SIGI, KAB. PARIGI MOUTONG, KAB. POSO, KAB. TOJO UNAUNA, KAB. BANGGAI, KAB. BANGGAI KEPULAUAN, KAB. BANGGAI LAUT, KAB. MOROWALI, KAB. MOROWALI UTARA, KAB. TOLITOLI, KAB. BUOL

Yang Maintenace 0 Kab/Kota.



NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	WEBSITE AKTIF/TIDAK		
		AKTIF	TIDAK	MAINTENANCE
1	KOTA PALU			
2	KABUPATEN DONGGALA			
3	KABUPATEN SIGI			
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG			
5	KABUPATEN POSO			
6	KABUPATEN TOJO UNAUNA			
7	KABUPATEN BANGGAI			
8	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN			
9	KABUPATEN BANGGAI LAUT			
10	KABUPATEN MOROWALI			
11	KABUPATEN MOROWALI UTARA			
12	KABUPATEN TOLITOLI			
13	KABUPATEN BUOL			

AWARD (PPID PELAKSANA)

NO	PERANGKAT DAERAH	SEPTEMBER			PREDIKAT				
		PPID	HUMAS	LAPOR	PPID	HUMAS	LAPOR	TOTAL	INDEKS
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	74	118	55	CUKUP INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	173	18.45
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAERAH	95	165	65	INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	230	23.69
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	85	85	0	MENUJU INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	85	21.20
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	74	144	75	CUKUP INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	CUKUP RESPONSIF	219	18.45
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	92	159	65	INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	224	22.94
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	75	132	10	CUKUP INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	142	18.70
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	97	169	60	INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	229	24.19
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	0	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	0.00
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	87	167	70	MENUJU INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	CUKUP RESPONSIF	237	21.70
10	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	70	124	55	CUKUP INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	179	17.46
11	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR	94	165	15	INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	180	23.44
12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	0.00
13	DINAS KEBUDAYAAN	23	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	5.74
14	DINAS KEHUTANAN	23	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	5.74
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	92	171	70	INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	CUKUP RESPONSIF	241	22.94
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	72	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	17.96
17	DINAS KESEHATAN	75	109	10	CUKUP INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	119	18.70
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	92	166	70	INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	CUKUP RESPONSIF	236	22.94
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	89	160.5	50	MENUJU INFORMATIF	CUKUP KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	210.5	22.19
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	65	71	5	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	76	16.21
21	DINAS PANGAN	62	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	15.46
22	DINAS PARIWISATA	74	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	18.45
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	15.46
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	52	0	0	KURANG INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	12.97
25	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	77	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	19.20
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	95	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	23.69
27	DINAS PENDIDIKAN	0	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	0.00
28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	58	0	0	KURANG INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	14.46
29	DINAS PERHUBUNGAN	72	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	17.96
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	68	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	16.96
31	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	52	0	0	KURANG INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	12.97
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	52	0	0	KURANG INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	12.97
33	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	0.00
34	DINAS SOSIAL	92	132	65	INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	197	22.94
35	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	34	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	8.48
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	0.00
37	INSPEKTORAT DAERAH	95	95	0	INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	95	23.69
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	87	134	60	MENUJU INFORMATIF	KURANG KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	194	21.70
39	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI	3	3	0	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	3	0.75
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	72	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	17.96
41	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI	90	0	0	CUKUP INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	22.44
42	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA	83	0	0	MENUJU INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	0	20.70

Penilaian PPID Award dilakukan melalui evaluasi mandiri dengan cara mengisi quisioner yang telah disebarakan oleh PPID Utama

Penetapan Hasil Monev Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Layanan Informasi dan Komunikasi Publik kategori **Informatif** :

- Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Layanan Informasi dan Komunikasi Publik kategori **Publikasi Informasi Publik** :

- Tidak ada yang memenuhi standar **Komunikatif**
- Terdapat beberapa OPD yang **Cukup Komunikatif** :
 1. Badan Kesatuan Bangsa Daerah
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan
 7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
 8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pengelolaan Layanan Aduan Masyarakat :

- Tidak ada yang memenuhi penilaian **Responsif**
- Terdapat beberapa OPD yang **Cukup Responsif** :
 1. Badan Pendapatan Daerah
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
 4. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Standar Penilaian Mandiri Berdasarkan Pengisian Quisioner yang dilakukan oleh PPID Pelaksana

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	RANGE
INFORMATIF	90-100
MENUJU INFORMATIF	80-89,9
CUKUP INFORMATIF	60-79,9
KURANG INFORMATIF	40-59,9
TIDAK INFORMATIF	0-39,9

PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	RANGE
KOMUNIKATIF	180-200
CUKUP KOMUNIKATIF	150-179,9
KURANG KOMUNIKATIF	100-149,9
TIDAK KOMUNIKATIF	0-99,9

PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT	RANGE
RESPONSIF	80-100
CUKUP RESPONSIF	70-79,9
KURANG RESPONSIF	50-69,9
TIDAK RESPONSIF	0-49,9

AWARD (PPID KAB/KOTA)

Penetapan Hasil Monev Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	PERIODE PENILAIAN			PREDIKAT			
		PPID	HUMAS	LAPOR	PPID	HUMAS	LAPOR	TOTAL
1	KOTA PALU							
2	KABUPATEN SIGI							
3	KABUPATEN DONGGALA							
4	KABUPATEN TOLITOLI	29	29	30	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	59
5	KABUPATEN BUOL	34	34	30	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	64
6	KABUPATEN MOROWALI							
7	KABUPATEN MOROWALI UTARA	21	71	60	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	131
8	KABUPATEN BANGGAI	27	54	60	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	KURANG RESPONSIF	114
9	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN							0
10	KABUPATEN BANGGAI LAUT	35	40	30	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	70
11	KABUPATEN PARIGI MOUTONG							0
12	KABUPATEN POSO							0
13	KABUPATEN TOJO UNAUNA	10	10	30	TIDAK INFORMATIF	TIDAK KOMUNIKATIF	TIDAK RESPONSIF	40

Terdapat 7 Kab/Kota yang tidak mengisi quisioner yang telah dibagikan :

- Kota Palu
- Kab. Sigi
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso

Layanan Informasi dan Komunikasi Publik kategori **Informatif** :

- Untuk PPID Kab/Kota tidak ada yang masuk penilaian **Informatif**
- Terdapat beberapa Kab/Kota yang mengisi quisioner namun tidak memenuhi standar penilaian :
 1. Kab. Toli-toli
 2. Kab. Buol
 3. Kab. Morowali Utara
 4. Kab. Banggai
 5. Kab. Banggai Laut
 6. Kab. Tojo una-una

LAPORAN APLIKASI SP4N LAPOR DI PEMERINTAH PROV.SULAWESI TENGAH

PERIODE : 1 JANUARI s.d. DESEMBER 2023

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total	%TL	RTL	RHP	Terakhir Dilihat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	0	3	2	49	54	94.4	1.2	0	2024-05-03 08:26:34
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI	0	0	0	11	11	100	0.2	0	2023-10-23 14:56:01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	0	8	8	100	1.4	0	2024-01-22 12:24:32
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	0	0	0	6	6	100	0.3	0	2023-10-16 10:19:29
DINAS SOSIAL PROVINSI	0	1	0	5	6	83.3	4.2	0	2023-10-05 14:06:43
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	0	0	5	5	100	2.2	0	2023-09-26 13:12:49
DINAS KESEHATAN PROVINSI	0	2	0	2	4	50	0	0	2022-10-31 18:36:37
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	0	0	0	3	3	100	0.7	0	2023-11-28 09:10:47
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	0	0	0	3	3	100	2.3	0	2024-01-18 09:25:39
RUMAH SAKIT UNDATA	0	0	1	1	2	100	0	0	2023-1 16:34

- **Belum terverifikasi "0"** artinya semua Aduan yg masuk di admin Pemprov dlm hal ini Dinas Kominfo semuanya sdh diteruskan ke OPD utk ditindaklanjuti
- **Belum ditindaklanjuti** contohnya sprt Pemprov Sulteng dlm hal ini Biro Adpim belum menindaklanjuti aduan yg sdh diteruskan oleh Admin Provinsi (Dinas Kominfo) sebagai admin utama begitu jg dgn OPD yg lain
- **Proses** artinya aduan yg di Biro Adpim msh ada 2 aduan yg dlm Proses penyelesaian
- **Selesai** contohnya sprt Biro Adpim sdh menyelesaikan aduannya sebanyak 40 aduan yg diterima
- **Total** artinya jumlah aduan yg diterima OPD selama 1 thn

Ke Atas

Data Aduan Masyarakat Diskominfo Kab/Kota

REKAPITULASI DATA TINDAKLANJUT PENGADUAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI APLIKASI LAPOR! SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2023							
NO	PEMERINTAH DAERAH	BLM DIVERIFIKASI	BLM DITINDAKLANJUTI	SEDANG DIPROSES	SELESAI	TOTAL	PERSENTASE
1	KOTA PALU	2	7	0	210	219	96%
2	KABUPATEN DONGGALA	42	1	0	2	45	4%
3	KABUPATEN SIGI	1	2	1	29	33	88%
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	6	1	84	9	100	9%
5	KABUPATEN POSO	3	17	1	7	28	25%
6	KABUPATEN TOJO UNAUNA	0	0	0	0	0	0%
7	KABUPATEN BANGGAI	3	0	0	9	12	75%
8	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	0	8	0	3	11	27%
9	KABUPATEN BANGGAI LAUT	0	0	4	30	34	88%
10	KABUPATEN TOLITOLI	0	0	1	65	66	98%
11	KABUPATEN BUOL	0	21	0	1	22	5%
12	KABUPATEN MOROWALI	0	1	5	61	67	91%
13	KABUPATEN MOROWALI UTARA	0	0	0	21	21	100%
JUMLAH		57	58	96	447	658	

Aduan yg diterima tdk dapat di verifikasi oleh Provinsi karena aduan yg masuk tidak dapat dibaca oleh Provinsi, hanya Admin Kab/kota saja yang dapat memproses aduan tersebut dikarenakan Status Admin utama melekat di Dinas Kominfo Kab/kota dalam artian Kominfo Kab/Kota memiliki status yg sama dengan Provinsi sebagai **Admin Utama**



Terima Kasih

O